

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hartono, S.R., 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P.M. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kota: Kencana

Mertokusumo, S., 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

Salim, H.A.A.. 2002. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Sumitra, R.H., 1998. *Asuransi Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Karya Ilmiah:

Asri, K.N., Saptono, H. dan Njatrijani, R., 2017. “Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang”. *Diponegoro Law Journal*, Volume VI No. 2

Nova Kristina, Pelaksanaan Pemberian Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas oleh PT. Jasa Raharja di Kota Pekanbaru

Pradita Winda Pratiwi, Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Rahayu, S. dan Roesli, M. 2019. :Hukum Dagang Di Indonesia (A Review)”. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Volume V No. 2, pp.297-304.

Rina Florensa Sitompul, Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Korban Kecelakaan Kendaraan Bermotor Terhadap Penolakan Pemberian Dana Santunan Oleh Pt. Jasa Raharja (Persero) Di Denpasar

Tsani, M.M., 2021. “Hukum Dagang di Indonesia” [Www Document]. Doi:10.31219/Osf.Io/M3ugk

Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum:

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK010/2008.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan Umum.

Republik Indonesia, Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo PP Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo PP Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Pasal 18 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Artikel dan Berita Online:

Fardiansyah. A., “Kecelakaan Lalin di Jakarta Sepanjang 2019 Capai 7.922, Korban Meninggal 509 Orang”. <https://megapolitan.okezone.com>, diakses tanggal 1 April 2021